

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan dalam sektor pemerintahan diperlukan oleh pihak yang berada dalam organisasi dan pihak yang berada diluar organisasi dalam menentukan sebuah keputusan. Adanya peningkatan tuntutan masyarakat tentang akuntabilitas dan transparansi terkait terwujudnya *good governance* diharapkan akan mendorong pihak yang bertanggung jawab khususnya dalam pengelolaan keuangan pemerintah mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga dapat menciptakan aparatur yang tertib dan bisa menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Satriawan dan Dewi,2020). Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bentuk transparansi pemerintah tersebut berupa pembuatan laporan keuangan (Aqila dan Yusmita, 2022) dengan adanya penyusunan laporan keuangan pemerintah dapat mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan kepada publik sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus berisi informasi akuntansi yang bermanfaat dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (Rosa *et al.*, 2020), sehingga dapat

digunakan oleh para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kurangnya kualitas informasi dalam laporan keuangan yang disajikan sering menjadi permasalahan dalam suatu instansi yang ada di Indonesia. Informasi laporan keuangan dapat menjadi bias ketika laporan keuangan yang disajikan tidak lengkap dan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan harus memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berkualitas.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan disuatu daerah dapat dinilai masyarakat dari opini yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah. Daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Karlina, 2021). Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, opini pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan berdasarkan kriteria umum, yaitu kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern (Standar Negara, 2017).

Kriteria pemeriksaan yang tertuang dalam standar pemeriksaan keuangan negara tahun 2017 akan mempengaruhi opini yang akan diberikan kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Semakin banyak jumlah pelanggaran dan ketidaksesuaian terhadap kriteria yang telah ditentukan, maka opini yang diberikan

akan semakin buruk. Pelanggaran yang dilakukan akan dibandingkan dengan kriteria yang ditentukan untuk membandingkan materialitasnya (Karlina, 2021), opini WTP adalah syarat dasar untuk mewujudkan *good governance*. Badan pemeriksa keuangan (BPK) RI sebagai auditor eksternal di Indonesia yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Bali, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh BPK RI pemerintah kabupaten Bangli pernah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) selama dua tahun berturut-turut, kemudian meningkat menjadi opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli tertuang pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. 1
Opini Audit atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bangli
Tahun 2015-2022

Tahun Anggaran	Opini BPK
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK-RI, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa opini BPK untuk pemerintah kabupaten Bangli mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2015 sampai 2016 opini BPK yang diperoleh pemerintah kabupaten Bangli adalah opini wajar dengan pengecualian (WDP), hal ini menandakan bahwa laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada standar pemeriksa keuangan negara tahun 2017. Opini wajar dengan pengecualian diperoleh disebabkan karena adanya permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan mengenai penatausahaan asset milik daerah yang belum optimal sehingga terjadi kemerosotan pada laporan keuangan necara terkait dengan asset (AntaraBali, 2015).

Kemudian pada tahun 2017 sampai 2022 pemerintah kabupaten Bangli berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan. Pemerintah kabupaten Bangli berhasil meningkatkan opini yang diperoleh dari WDP yang diperoleh selama dua tahun berturut-turut menjadi opini WTP dalam hal ini terjadi peningkatan terkait kualitas laporan keuangan. Akan tetapi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh oleh kabupaten Bangli bukan berarti bebas dari kelemahan dan kesalahan. Badan pemeriksa keuangan (BPK) masih menemukan beberapa kelemahan terkait dengan adanya kekeliruan dan kekurangan administrasi keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan adanya aturan yang berubah-ubah, ini mencerminkan lemahnya tingkat informasi yang responsif dari para pelaksana kegiatan di OPD

kabupaten Bangli serta masih adanya sistem administrasi yang berbelit-belit sehingga menghambat kecepatan dalam proses penyusunan laporan keuangan (NusaBali,2023).

Adanya permasalahan terhadap kualitas laporan keuangan di organisasi perangkat daerah kabupaten Bangli mengenai lemahnya sistem pengendalian intern yang dapat dilihat dengan adanya kekeliruan administrasi keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tingkat responsif dari para pelaksana kegiatan di OPD yang lemah. Hal ini menandakan bahwa sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan kegiatan pemantauan masih belum dilaksanakan secara maksimal dalam kegiatan di dalam organisasi perangkat daerah kabupaten Bangli dalam penyajian laporan keuangan daerah. Maka dari itu kualitas laporan keuangan di organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten Bangli masih memiliki permasalahan terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan komitmen organisasi dalam organisasi perangkat daerah. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai tingkat kesediaan individu dalam sebuah organisasi untuk melanjutkan upaya demi memajukan kepentingan organisasi mereka (Aqila dan Yusmita, 2022). Hal ini disebabkan anggota dengan komitmen organisasi yang tinggi akan mampu mencapai kinerja yang tinggi serta menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam pencapaian tujuan organisasi. Komitmen organisasi menjadi hal yang sangat penting dan perlu diterapkan dalam pemerintahan agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih bermutu sehingga dapat menggambarkan adanya keberpihakan

pegawai untuk tetap menjadi anggota organisasi, adanya komitmen organisasi ini maka dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian mengenai komitmen organisasi dilakukan oleh Pradnyandari dan Putra (2022) bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aqila dan Yusmita (2022), Dalia *et al.*, (2022) memperoleh hasil komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aziyah dan Yanto (2022) memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain komitmen organisasi yang tinggi dalam menghasilkan laporan keuangan, faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kompetensi sumber daya manusia (Hartono dan Ramdany, 2020). Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Penyusunan laporan keuangan memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten serta menguasai akuntansi pemerintah. Sumber daya manusia yang berkompeten adalah sumber daya yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta memiliki pengalaman dalam keuangan. Dengan sumber daya yang berkompeten ini akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas baik dari segi penyusunan laporan keuangan hingga pelaporan dari laporan keuangan yang dibuat. Kegagalan sumber daya manusia di pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan memberikan dampak pada kekeliruan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang disajikan tidak berkualitas.

Penelitian mengenai kompetensi sumber daya manusia dilakukan oleh Pradnyandari dan Putra (2022) memperoleh hasil kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dalia *et al.*, (2022) dan Adhillah (2022) memperoleh hasil kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.*, (2020) memperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal mendasar yang mempengaruhi dari kualitas laporan keuangan adalah penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, definisi standar akuntansi pemerintah yang disingkat dengan sebutan SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah (Ariyanto, 2020). Standar akuntansi pemerintah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, pemerintah pusat dan daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam Upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan (Mahartini *et al.*, 2021)

Penelitian mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah dilakukan oleh Ariyanto (2020) memperoleh hasil penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adhillah (2022) dan Hermawan (2022) memperoleh hasil penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Mahartini *et al.*, (2021) memperoleh hasil penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan memerlukan adanya teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi akan berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan hal itu dapat dilihat dari segi minimnya kesalahan dan kekeliruan yang terjadi (Satriawan dan Dewi, 2020). Pemanfaatan teknologi dalam aplikasi komputer akuntansi pemerintah daerah sangat penting dalam membantu aparatur pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan sehingga lebih efektif dan efisien. Adanya teknologi yang canggih dan modern tentu dapat memberikan kemudahan kepada organisasi dalam mempercepat proses pertanggungjawaban dan keterbukaan mengenai laporan keuangan kepada para *stakeholder*. Dalam tata kelola keuangan pemerintah sudah dipermudah dengan adanya teknologi digital yang diterapkan dalam menghasilkan informasi sebagai bahan dasar pengambilan keputusan.

Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi dilakukan oleh Nurhayati dan Patadungan (2022) memperoleh hasil pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Binawati dan Nindyaningsih (2022) dan Ridzal *et al.*, (2022) memperoleh hasil pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Satriawan dan Dewi (2020) memperoleh hasil pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal yaitu sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan asset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal (Kapriana dan Agung, 2020). Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah juga ditentukan seberapa tinggi pengendalian intennya. Jika pengendalian intern lemah dalam suatu organisasi pemerintah maka akan sulit dalam mendeteksi kecurangan dalam proses akuntansi yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern merupakan salah satu kriteria dalam pemberian opini badan pemeriksa keuangan (BPK) hal tersebut tertuang dalam standar pemeriksaan keuangan negara tahun 2017. Sistem pengendalian intern menjadi kunci dalam keberhasilan penyusunan laporan keuangan karena dengan adanya sistem pengendalian intern dapat meningkatkan komitmen organisasi dalam penyusunan laporan keuangan melalui adanya kontrol internal dan komunikasi pada setiap individu yang ada dalam organisasi untuk dapat mendeteksi kecurangan dan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Selain itu sistem pengendalian intern dapat pengawas kompetensi sumber daya manusia dengan memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan memiliki kualifikasi pengetahuan dan keterampilan yang memadai (Kapriana dan Agung,2020). Sistem pengendalian intern juga mencakup dalam pemisahan tugas yang tepat dan kontrol internal untuk mencegah

kecurangan dan kesalahan yang mungkin muncul akibat ketidakmampuan atau tindakan tidak etis sumber daya manusia, sehingga dengan adanya sistem pengendalian intern dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian mengenai sistem pengendalian intern sebagai pemoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Kapriana dan Agung (2020) yang memperoleh hasil sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rosa *et.al.*, (2020) yang memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern dalam penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan dengan memastikan bahwa proses akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku melalui penegakan kebijakan dan pemantauan dalam organisasi untuk menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah (Farikhoh,2019). Hal ini membantu meminimalkan risiko kesalahan atau ketidaksesuaian sehingga meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan. Selain itu sistem pengendalian intern juga menyediakan kerangka kerja untuk menilai dan mengoreksi potensi ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Penelitian mengenai sistem pengendalian intern sebagai pemoderasi penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Farikhoh (2019) dan Jauhari *et al.*, (2021) yang memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan

penelitian yang dilakukan Mahmud dan Lukum (2023) yang memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern juga dapat membantu memperkuat pemanfaatan teknologi terhadap penyusunan laporan keuangan melalui keamanan dan efisiensi penggunaan teknologi (Budiman dan Gafur, 2023). Dengan menetapkan kontrol internal organisasi dapat melindungi data keuangan, mencegah akses yang tidak sah, dan memastikan bahwa sistem informasi mendukung akuntansi yang akurat. Pengendalian tersebut mencakup kebijakan perlindungan data, pengujian keamanan, dan pemantauan sistem secara teratur untuk mengidentifikasi potensi risiko atau kesalahan teknologi yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan demikian sistem pengendalian intern berperan dalam menjaga keandalan informasi keuangan yang dihasilkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian mengenai sistem pengendalian intern sebagai pemoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Sari (2020) yang memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Gafur (2023) yang memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan hasil dalam mengkaji kualitas laporan keuangan, maka peneliti tertarik mengkaji kembali pengaruh komitmen organisasi, kompetensi sumber daya

manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai pemoderasi di Kantor Pemerintah Kabupaten Bangli

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
- 2) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
- 3) Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
- 4) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
- 5) Apakah sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan ?
- 6) Apakah sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan?
- 7) Apakah sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan?
- 8) Apakah sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan.
- 6) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
- 7) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
- 8) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

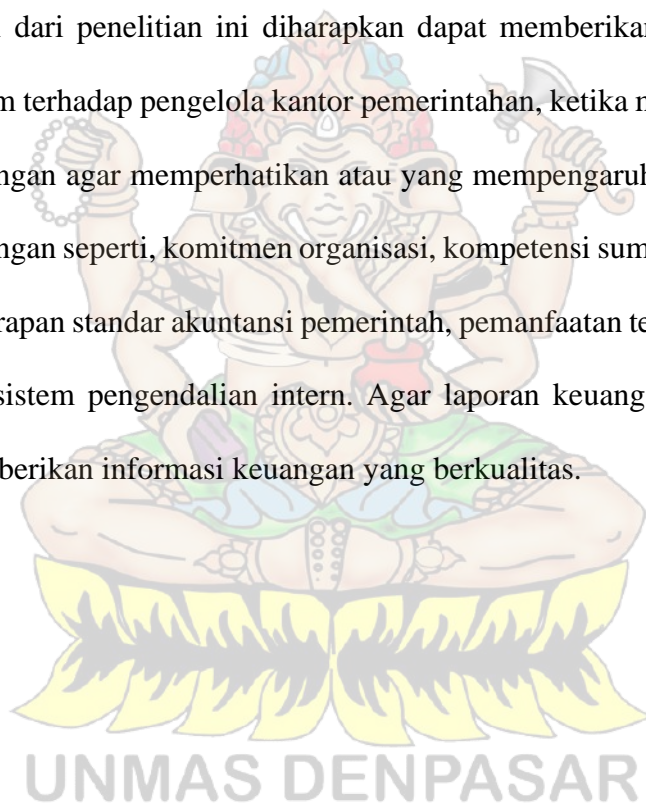
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, seperti berikut ini :

- 1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan mendukung teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori *agency*. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman dalam ilmu akuntansi mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).

2) Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara umum terhadap pengelola kantor pemerintahan, ketika merancang laporan keuangan agar memperhatikan atau yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti, komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern. Agar laporan keuangan yang disajikan memberikan informasi keuangan yang berkualitas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Terori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidak lengkapan suatu informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan), kontrak yang dimaksud disini adalah kontrak antara *principal* (pemberi kerja misalnya pimpinan perusahaan) dengan *agent* (penerima perintah misalnya bawahan).

Menurut Mardiasmo (2018:27) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Hubungan rakyat sebagai *principal* dan kepala daerah sebagai *agent*. Keterkaitan penelitian ini dengan *teori agency* dapat dilihat dalam kualitas laporan keuangan, dimana pemerintah Kabupaten Bangli bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban untuk menyajikan informasi laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *principal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, politik

secara langsung atau tidak langsung. Dalam suatu pemerintahan yang demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan.

2.1.2 **Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan atau catatan yang berisi informasi seputar keuangan suatu organisasi (Aqila dan Yusmita, 2022) dimana transaksi-transaksi dan peristiwa dicatat, digolongkan, dan diringkas dalam satuan uang kemudian dilakukan penafsiran untuk berbagai tujuan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi Keputusan mengenai alokasi sumber daya. Kualitas laporan keuangan merupakan hasil yang berguna bagi pengguna dalam menyediakan informasi sesuai karakteristik kualitatif atau karakteristik yang berkualitas terhadap informasi keuangan.

Laporan keuangan harus dapat menyediakan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan baik secara internal ataupun laporan keuangan secara eksternal. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat memberikan pemahaman dan informasi yang lebih tentang kondisi di dalam instansi atau organisasi, Adapun karakteristik dari laporan keuangan yang berkualitas berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu:

- 1) Relevan artinya laporan keuangan yang disajikan harus memuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan dapat memprediksi masa depan.

- 2) Andal yaitu laporan keuangan yang disajikan dapat terverifikasi keasliannya, laporan keuangan bebas dari informasi yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur.
- 3) Dapat dibandingkan artinya laporan keuangan yang disajikan harus dalam dua periode untuk meminimalisir terjadi kecurangan posisi keuangan.
- 4) Dapat dipahami artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi keuangan.

2.1.3 **Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi merupakan tingkat kesediaan seorang individu dalam sebuah organisasi untuk melanjutkan upaya demi memajukan kepentingan organisasi mereka (Aqila dan Yusmita, 2022). Komitmen organisasi menjadi hal yang sangat penting dan perlu diterapkan dalam pemerintahan agar laporan keuangan yang dihasilkan memiliki informasi yang berkualitas. Pengertian ini berfungsi untuk menggambarkan bahwa komitmen organisasi adalah bagaimana seseorang memihak pada sebuah organisasi tertentu beserta dengan tujuan serta berkomitmen untuk tetap menjadi anggota dari organisasi.

Kekuatan komitmen dari setiap pegawai terhadap pengelolaan keuangan kemudian penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat meningkatkan

kualitas laporan keuangan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi terdiri dari tiga komponen komitmen, yaitu:

- 1) Komitmen afektif (*affective commitment*) dapat didefinisikan sebagai komitmen yang berkaitan dengan keterlibatan emosional pegawai, identifikasi pegawai dan keterlibatan pegawai dalam organisasi.
- 2) Komitmen kontinu (*continuance commitment*) dapat dijelaskan sebagai komitmen yang berkaitan dengan kesadaran akan ketidakmungkinan memilih identitas sosial atau alternatif tingkah laku lain karena adanya ancaman akan Kerugian besar.
- 3) Komitmen normative (*normative commitment*) dapat dijelaskan sebagai komitmen yang berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi.

Komitmen dibutuhkan oleh organisasi agar sumber daya manusia yang kompeten dalam organisasi dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Hal ini disebabkan anggota dengan komitmen organisasi yang tinggi akan mampu mencapai kinerja yang tinggi serta menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam pencapaian tujuan organisasi.

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah karakteristik seorang individu yang bisa ditinjau berdasarkan segi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap perilaku yang dimiliki seorang individu perihal penyelesaian berbagai tugas yang diberikan kepadanya (Pradnyandari dan Putra, 2022). Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Peningkatan kualitas laporan keuangan suatu pemerintah daerah dapat bergantung pada

kompetennya sumber daya manusia, kurangnya pemahaman sumber daya manusia untuk menyusun laporan keuangan yang menyebabkan salah saji dalam pelaporan laporan keuangan dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Spencer (1993) menunjukkan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang terdiri dari *knowledge*, *skill*, *attitude* yang ada hubungan sebab akibat dengan prestasi kerja. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003 ditentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keahlian, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, yaitu:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*) yaitu fakta dan angka dibalik aspek-aspek teknis.
- 2) Keahlian/Keterampilan (*skill*) yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus, dengan kegiatan yang paling sedikit.
- 3) Sikap/Prilaku (*attitude*) yaitu yang ditunjukkan kepada atasan atau orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya.

Diperlukannya sumber daya manusia yang kompeten untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi (keuangan) saja tidak cukup, mereka harus dilatih agar mampu melakukan penyesuaian terhadap pengetahuan akuntansi pemerintah yang berbeda dengan akuntansi pemerintah sebelumnya akuntansi komersial yang mereka pelajari.

2.1.5 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Mahartini *et al.*, 2021). Standar akuntansi pemerintah adalah persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Dengan ditetapkannya SAP maka pemerintah pusat dan daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini menandakan bahwa informasi keuangan pemerintah dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Manfaat lain yang diperoleh dari adanya penerapan standar akuntansi pemerintah yaitu laporan keuangan yang disajikan pemerintah memberikan informasi yang jujur, terbuka kepada seluruh *stakeholder*. Selain itu pada lingkup internal organisasi pemerintah adanya penerapan standar akuntansi pemerintah dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian aset, kewajiban, ekuitas dana pemerintah.

Standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 memuat dua belas pedoman standar akuntansi pemerintah, yaitu:

- 1) PSAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- 2) PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis
- 3) PSAP No.3 tentang Laporan Arus Kas

- 4) PSAP No. 4 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
- 5) PSAP No. 5 tentang Akuntansi Persediaan
- 6) PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi
- 7) PSAP No.7 tentang Aset Tetap
- 8) PSAP No. 8 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 9) PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban
- 10) PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Biaya Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
- 11) PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi
- 12) PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional

Standar akuntansi pemerintah digunakan sebagai pedoman dalam menyatukan persepsi antara penyusunan, pengguna, dan auditor (Ariyanto, 2020). Pemerintah pusat juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan standar akuntansi pemerintah untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan badan pemeriksa keuangan (BPK) sebagai eksternal auditor pemerintah akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

2.1.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya (Binawati dan Nindyaningsih 2022). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi

informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan mendistribusikan informasi keuangan kepada publik.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk mengelola sebuah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan agar informasi yang dihasilkan menjadi berkualitas, serta informasi yang disajikan menjadi relevan, akurat, dan tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Sari, 2020). Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah daerah dilakukan dengan penggunaan aplikasi berbasis *website* dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dengan adanya penggunaan teknologi informasi maka akan meminimalisir adanya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan memiliki informasi yang berkualitas.

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat. Manfaat lain dari pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi pemerintah daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan volume transaksi yang besar, oleh karena itu diperlukannya pemanfaatan teknologi informasi untuk dapat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.1.7 Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari dibangunnya sistem pengendalian intern menurut (Mahmudi, 2016:252), yaitu: melindungi aset negara baik fisik maupun data, memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat, memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (standar akuntansi pemerintah), meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi, dan menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem pengendalian intern terdiri dari unsur-unsur, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Penyelenggaraan pemerintah yang memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi (Hartono dan Ramdany, 2020), maka diperlukannya sistem pengendalian intern untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan.

Sistem pengendalian intern dalam hal ini menjadi kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam sistem pengendalian

intern terdapat berbagai aktivitas pengendalian sehingga semua kegiatan dalam penyusunan, penyajian, dan pelaporan dari laporan keuangan pasti telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu dengan sistem pengendalian intern juga dapat mengontrol resiko-resiko yang akan dihadapi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

Pradnyandari dan Putra (2022) melakukan penelitian mengenai variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus kepada perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Tabanan), Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan. Populasi penelitian mencakup 32 OPD yang berada dikabupaten Tabanan. Teknik pengambilan dan penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan mengambil 4 sampel responden dalam setiap OPD dengan jumlah total 128 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Aqila dan Yusmita (2022) melakukan penelitian mengenai variabel komitmen organisasi, penerapan kebijakan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan (studi empiris pada SKPD kabupaten Aceh Besar), JIMEKA. Populasi penelitian mencakup 58 SKPD yang berada di kabupaten Aceh Besar. Teknik pengambilan dan penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampel jenuh (*saturated sampling*) dengan jumlah 120 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalia *et al.*, (2022) melakukan penelitian mengenai variabel kompetensi SDM, tekanan eksternal, komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan (studi pada pemerintah kota Malang), Jurnal akuntansi. Populasi penelitian mencakup organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdiri dari 3 dinas dan satu badan (BKAD). Teknik pengambilan dan penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan sampel jenuh dengan jumlah 60 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu Smart PLS. hasil penelitian menunjukkan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Aziyah dan Yanto (2022) melakukan penelitian mengenai variabel sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan sumber daya manusia sebagai pemoderasi terhadap kualitas laporan keuangan, (studi empiris pada OPD kabupaten Batang) Owner. Populasi penelitian mencakup 44 OPD kabupaten

Batang. Teknik pengambilan dan penentuan sampel dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 88 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sumber daya manusia tidak mampu memoderasi hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, sumber daya manusia tidak mampu memoderasi hubungan antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Adhillah (2022) melakukan penelitian mengenai variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (studi empiris pada pemerintah Sumatera Selatan), jurnal ilmiah sosial teknik. Populasi penelitian mencakup 39 organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada di provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengambilan dan penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 105 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Putri *et al.*, (2020) melakukan penelitian mengenai variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, (studi empiris

pada OPD kabupaten Sumenep) JAFIS. Populasi penelitian mencakup 22 OPD yang ada di kabupaten Sumenep. Teknik pengambilan dan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 66 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Ariyanto (2020) melakukan penelitian mengenai variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, (studi empiris pada kabupaten Pelalawan) jurnal Valuta. Populasi penelitian mencakup dinas pegelolaan keuangan daerah dan sekretariat daerah. Teknik pengambilan dan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 35 sampel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Hermawan (2022) melakukan penelitian mengenai variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, jurnal ilmiah multi disiplin Indonesia. Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sub akuntansi kota Kediri. Teknik pengambilan dan penentuan sampel

menggunakan sampel jenuh dengan jumlah 10 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Mahartini *et al.*, (2021) melakukan penelitian mengenai variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, (studi empiris pada pemerintah kabupaten Karangasem) jurnal KARMA. Populasi penelitian mencakup semua organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten Karangasem yang berjumlah 1.292. Teknik pengambilan dan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 87 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Nurhayati dan Patadungan (2022) melakukan penelitian mengenai variabel sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, jurnal mirai management. Populasi penelitian mencakup 25 OPD pada kabupaten Luwu. Teknik pengambilan dan penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampel jenuh dengan jumlah 58 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian

intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Binawati dan Nindyingsih (2022) melakukan penelitian mengenai variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, (studi empiris pada dinas-dinas SKPD kabupaten Klaten) OPTIMAL. Populasi penelitian mencakup 24 OPD di kabupaten Klaten. Teknik pengambilan dan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 152 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Ridzal *et al.*, (2022) melakukan penelitian mengenai variabel kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, (studi pada pemerintah daerah kabupaten Buton Selatan) Owner. Populasi penelitian mencakup 33 dinas pada kabupaten Buton Selatan. Teknik pengambilan dan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 132 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif

terhadap kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Satriawan dan Dewi (2020) melakukan penelitian mengenai variabel komitmen organisasi memoderasi pengaruh pengendalian intern, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan (studi pada SKPD Kabupaten Buleleng), *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. Populasi penelitian mencakup sebanyak 29 OPD yang berada di kabupaten Buleleng. Teknik pengambilan dan penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 116 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut *moderated regression analysis*. Hasil penelitian menunjukkan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasi mampu memperkuat hubungan antara pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, komitmen organisasi mampu memperkuat hubungan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, komitmen organisasi tidak mampu memperkuat hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Kapriana dan Agung (2020) melakukan penelitian mengenai variabel kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai pemoderasi, (studi empiris OPD kabupaten Kuburaya) *JAAKFE*.

Populasi penelitian mencakup 35 OPD yang ada di Kuburaya. Teknik pengambilan dan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 85 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu *Structural Equation Modelling* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Rosa *et al.*, (2020) melakukan penelitian mengenai variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai pemoderasi, (studi kasus pada OPD kabupaten Wonogiri). Populasi dalam penelitian mencakup 53 OPD kabupaten Wonogiri. Teknik pengambilan dan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 106 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern tidak mampu memperkuat hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Jauhari *et al.*, (2021) melakukan penelitian mengenai variabel sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai pemoderasi di Provinsi Sumatera Selatan, Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi. Populasi dalam penelitian mencakup pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD). Teknik pengambilan dan penentuan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling* dengan jumlah 46 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

Farikhoh (2019) melakukan penelitian mengenai variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur pemerintah daerah, *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan, (studi pada SKPD di Kota Tegal). Populasi dalam penelitian mencakup pegawai bagaian keuangan di SKPD kota Tegal. Teknik pengambilan dan penentuan sampel menggunakan teknik *convenience sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, *good governance*

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi hubungan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.

Mahmud dan Lukum (2023) melakukan penelitian mengenai variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai pemoderasi, (studi empiris kota Gorontalo) *Jamora Accounting Riview*. Populasi penelitian mencakup semua pegawai yang ada di Badan Keuangan kota Gorontalo. Teknik pengambilan dan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 125 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi hubungan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern mampu memoderasi kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan

Sari (2020) melakukan penelitian mengenai variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai pemoderasi, (studi empiris kabupaten Sidoarjo) *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Populasi penelitian mencakup 20 OPD yang ada di kabupaten Sidoarjo. Teknik pengambilan dan penentuan sampel yang

digunakan dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 68 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Budiman dan Gafur (2023) melakukan penelitian mengenai variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai pemoderasi, (studi empiris pada kabupaten Kutai Timur) JEBM. Populasi penelitian mencakup 57 SKPD kabupaten Kutai Timur. Teknik pengambilan dan penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 171 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Karlina (2021) melakukan penelitian mengenai variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah,

pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, (studi OPD Kabupaten Bangli). Populasi penelitian mencakup organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten Bangli dengan jumlah 14 OPD. Teknik pengambilan dan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 70 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada teknik penentuan sampelnya yang menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu dalam penentuan responden. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada populasi dan sampel yang digunakan serta tempat penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah 13 OPD Kabupaten Bangli dengan jumlah sampel berjumlah 52 responden.